



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13218>
Volume 7, No. 4, 2022 (1158-1166)

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Siti Amrina Hasibuan¹, Muhammad Syahbudi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sitiamrina338@gmail.com¹. bode.aries@uinsu.ac.id²

Abstrak

Kota Medan adalah salah satu kota yang berada di Sumatera utara yang memiliki Indeks Pembangunan yang terus meningkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan antara variabel pengeluaran sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan tipe data sekunder yang dihubungkan dengan runtun waktu. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan melakukan pencarian ekstensif untuk sumber yang tersedia sebelumnya atau data langsung. Dari 2017 hingga 2021, data untuk penelitian ini berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan yang kemudian di olah menggunakan SPSS. Hasil penelitiann menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses transisi yang menggerakkan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan guna mewujudkan tujuannya, yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat.. Pembangunan harus disampaikan dengan presisi benar dan tepat sasaran agar melangkah ke setiap tahapan yang semakin dekat ke arah tujuan. Pembangunan juga dilakukan secara terpadu dan berjangka panjang, sesuai dengan kepentingan dan tuntutan daerah masing-masing. dengan tujuan dan akar pembangunan Negara yang telah teridentifikasi ditentukan oleh perkembangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Keberadaan manusia merupakan sasaran pokok paling utama dalam seluruh kegiatan keberhasilan pencapaian pembangunan. Pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Negara dinyatakan maju tidak hanya dihitung dalam hal pendapatan produk domestik bruto saja, tetapi juga dari segi harapan hidup dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Dengan meningkatnya kapasitas, kreativitas dan produktivitas masyarakat sehingga mereka nantinya akan menjadi lembaga pertumbuhan yang efektif. Upaya untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang telah dilakukan dalam satu daerah harus mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana dampak dari pembangunan manusia terhadap masyarakat serta mampu memberitahukan gambaran mengenai persentase kinerja yang ideal secara keseluruhan.

Pembangunan juga menjadi tolak ukur bagi suatu negara untuk mencapai tujuannya, dan pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari indikator seberapa sukses suatu negara dalam pembangunannya. Paradigma pembangunan saat ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, yang didefinisikan sebagai tingkat kualitas hidup manusia setiap negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan suatu negara untuk menilai kualitas hidup penduduknya. Hal ini didasarkan pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat (*enlarging people's choice*), yang dapat dilihat dalam perjuangan untuk meningkatkan pilihan dan upaya untuk mencapai perbaikan sebagai hasil dari upaya tersebut. Ada empat variabel utama yang harus dipertimbangkan dalam mencapai tujuan pembangunan manusia: produktivitas, pemerataan, dan pemberdayaan.

UNDP telah membuat indeks komposit berdasarkan empat (empat) faktor: harapan hidup setelah lahir (harapan hidup pada usia), tingkat melek huruf dewasa (AMH), rata-rata lama sekolah (rata-rata tahun sekolah: MYS), dan paritas daya beli (PPP) (Paritas Daya Beli). Paritas daya beli mengukur aspek "kemampuan manusia untuk mengakses sumber daya ekonomi secara bermakna", sedangkan harapan hidup mengukur aspek "hidup panjang dan sehat". Tingkat melek huruf rata-rata dan lama sekolah mengukur aspek "pengetahuan dan keterampilan", dan keseimbangan daya beli mengukur aspek "kemampuan manusia untuk mengakses sumber daya ekonomi secara bermakna". besar. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dibaca sebagai Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada empat faktor (IPM) tersebut. Perhitungan IPM digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melacak kemajuan pembangunan manusia di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Mangkoesoebroto, belanja pemerintah merupakan mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan tertentu yang memiliki biaya yang harus dikeluarkan. Pengeluaran ini disediakan oleh APBN dan menjadi beban Negara. Anggaran yang dialokasikan ke suatu daerah menunjukkan komitmen negara terhadap isu-isu di sektor tersebut. Komitmen negara terhadap pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan, kemudian dituangkan dalam undang-undang. Menurut Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang direvisi pada tahun 2009, negara harus menyediakan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan untuk memenuhi tuntutan

penyelenggaraan pendidikan bangsa. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tentang pembagian dana pendidikan..

Hajibabaei dan Ahmadi berpendapat bahwa Ketika pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari PDB tetap di bawah ambang batas, IPM akan meningkat sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari PDB lebih tinggi dari aturan, IPM turun. Dalam penelitiannya, Scully menunjukkan bahwa ada kasus di mana pengeluaran pemerintah melampaui batas maksimum yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk memotong pengeluaran. Dalam beberapa kasus, penurunan alokasi anggaran tidak akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Alih-alih berfokus pada jumlah uang yang dikeluarkan, pemerintah harus fokus pada seberapa efektif pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk.

Dalam bidang pendidikan, pendidikan ini merupakan salah satu penopangpeningkatan suatu bangsa Pasal 31 UUD 1945 diubah pada tahun 2002, antara lain:

1. Seluruh warga negara berhak atas pendidikan.
2. Setiap orang berhak atas pendidikan dasar, dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya.
3. Pemerintah bercita-cita untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia sesuai dalam undang-undang.
4. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, negara mengalokasikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengamankan pendanaan pendidikan bagi semua warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Sistem pendidikan indonesia yang ditetapkan DPR tahun 2003. Karena pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia, dapat membantu perkembangan. Jika modal manusia merupakan input untuk fungsi produksi total, pendidikan hanyalah jenis tabungan yang mengarah pada peningkatan modal manusia dan pertumbuhan output total.

Sesuai dengan uraian tersebuttentangdampak anggaran dan pendanaan pemerintah bidangpendidikan serta kesungguhan pemerintah untuk menangani permasalahan dalam kemajuan pembangunan masyarakat, sehingga penulis ingin menelitilebih dalam tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan”.

Tinjauan Pustaka

A. Indeks Pembangunan Manusia

Amartyas Send dan Mahbub UI Haq dari UNDP (United Nations Development Program) mengemukakan Indeks pembangunan manusia pada tahun 1990, dan biasanya diterbitkan dalam laporan tahunan pembangunan manusia. IPM digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat dan apakah mereka semua dapat maju dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) awalnya dihitung di Indonesia pada tahun 1990 sebagai hasil kerjasama antara BPS dan

UNDP. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menawarkan perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia.

Menurut Todaro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi negara yang disusun berdasarkan pencapaian pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan riil yang ditetapkan. Unsur-Unsur pembentuk IPM akan menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang rendah tidak berarti bahwa pembangunan manusianya juga rendah.

Pengukuran rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam proses pengembangan kualitas manusia setiap manusia dalam bangsa memiliki tiga dasar dimensi. Pengukuran tersebut dijalankan dengan menggunakan beberapa pendapat dasar bahwa individu yang memiliki kualitas yaitu:

- a. Manusia yang berpeluang besar berumur panjang dan sehat, yang ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup sejak lahir.
- b. Manusia dengan keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk hidup, yang diukur dengan indikator tingkat melek huruf orang dewasa, yang memiliki bobot penilaian dua pertiga, dan indikator gabungan untuk angka partisipasi kasar di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang memiliki satu - bobot penilaian ketiga dalam perhitungan indeks pendidikan.
- c. Manusia yang dapat mencapai taraf hidup yang baik, yang dinilai dengan logaritma produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung dalam dolar AS dengan menggunakan indikasi Purchasing Power Parity (PPP)

C. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, pelatihan, atau nasehat yang diberikan kepada individu maupun kelompok agar menjadi sosok yang menghasilkan hasil yang bermanfaat dan berharga dari kreativitas atau penemuan pada manusia. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, menurut Todaro yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tujuan pembangunan yang paling utama. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sehingga sangat penting dalam pembentukan kemampuan manusia dan, lebih luas lagi, dalam pertumbuhan seseorang..

Michael P. Todaro berpendapat, ada dua jenis belanja pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya pendidikan sekolah untuk masing-masing siswa
Biaya pendidikan langsung individu berkaitan dengan semua biaya atau uang yang harus ditanggung oleh siswa dan keluarganya yang membiayai pendidikannya.
- b. Biaya kuliah dikumpulkan secara tidak langsung
Biaya pendidikan tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai bentuk bantuan keuangan pemerintah untuk mendanai pendidikan siswa.

Anggaran di bidang pendidikan adalah alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi di bidang pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, menurut Pasal 1 angka 40 UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Gaji pendidik termasuk dalam alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui biaya pembiayaan, tetapi tidak dalam anggaran pendidikan dinas. Ingin mendanai penyelenggaraan pendidikan, yang merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan mendapat anggaran minimal 20%

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah. Pasal 49 Sistem Pendidikan Nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Menurut undang-undang, dana pendidikan selain gaji pendidik dan belanja dinas pendidikan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, serta 20% dari APBN dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pendidikan (APBD).

D. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang, maka pemerintah harus mampu membangun gedung dan sistem pendidikan yang kompeten. Investasi pemerintah di bidang pendidikan merupakan wujud nyata komitmennya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Belanja pembangunan pendidikan dapat dibelanjakan secara merata untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Alokasi pemerintah sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan menunjukkan pengakuan pemerintah akan perlunya peningkatan pendidikan. Investasi pendidikan pemerintah akan berdampak pada pembangunan pendidikan, terutama ketika jumlah siswa yang mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi meningkat. Semakin tinggi tingkat rata-rata pengetahuan dan bakat masyarakat, semakin mudah bagi setiap orang usia kerja untuk memahami, menggunakan, dan menikmati manfaat kemajuan teknologi, sehingga meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan perekonomian.

Untuk mencapai kemajuan, suatu negara harus memperluas investasinya di bidang pendidikan dan kesehatan..

Astri, dan kawan kawan berpendapat bahwa Menurut Astri et al., tingkat belanja pendidikan pemerintah daerah memiliki dampak yang besar terhadap IPM, dimana setiap perubahan belanja pendidikan pemerintah daerah akan diikuti dengan perubahan IPM. Asri dkk. menekankan relevansi pembiayaan untuk peningkatan kualitas manusia sebagai investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan belanja di sektor pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan antara variabel pengeluaran sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini mengambil tempat di kota Medan. Periode penelitian berlangsung dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 16 Maret 2022. Penelitian ini menggunakan tipe data sekunder yang dihubungkan dengan runtun waktu. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan melakukan pencarian ekstensif untuk sumber yang tersedia sebelumnya atau data langsung. Dari 2017 hingga 2021, data untuk penelitian ini berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan (5 tahun).

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi, yang meliputi pengumpulan dan analisis data dari bahan-bahan yang diperoleh sebelumnya mengenai subjek yang diteliti. Antara 2017 dan 2021, data dikumpulkan. Pendekatan Analisis Jalur digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Melalui indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening, analisis jalur mencoba membuktikan hipotesis, yaitu bahwa investasi pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan

variabel utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah benar-benar mungkin untuk menerapkan hasil estimasi jalur secara sempurna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Dilihat dari kurva P-P, pengujian normalitas sebaran data menyatakan bahwa uji normalitas data adalah signifikan. Gambar titik-titik yang cenderung mengikuti garis kurva digambarkan dalam plot. Artinya, data dalam model penelitian untuk ketiga variabel tersebut terdistribusi secara teratur..

2. Uji Auto Korelasi Nilai DurbinWatson (DW) digunakan untuk uji autokorelasi dalam penelitian ini. Dengan nilai sekitar angka 2, uji autokorelasi untuk menguji asumsi korelasi residual antara periode t-t dan periode sebelumnya (t-1) menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Uji autokorelasi menghasilkan skor -2 1,160 2 atau berkisar antara -2 dan +2, menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki autokorelasi

3. Uji Multikolinearitas Nilai VIF digunakan untuk melakukan uji multikolinearitas dalam penelitian ini. Model tidak menunjukkan multikolinearitas jika ukuran nilai VIF diatur ke 10 (VIF 10). Karena nilai VIF pada kolom Collinearity Statistic adalah 1.000 (pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan), maka nilai VIF untuk semua variabel kurang dari 10 (VIF10), menunjukkan bahwa model bebas dari gejala multikolinearitas..

4. Uji Heteroskedastisitas Jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas, berdasarkan keluaran Uji Heteroskedastisitas Scatterplot. Akibatnya, model tidak memiliki masalah dengan heteroskedastisitas. Sedangkan untuk mempelajari temuan pengujian parsial atau pengujian individu terhadap hubungan antar variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai F yang dihasilkan dengan alat analisis SPSS adalah 9,989 lebih besar dari 7,71 dengan signifikansi 0,39 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Y (Indeks Pembangunan Manusia) di Kota Medan.

Hasil Uji T

Hasil pengujian Hipotesis Kedua (H2), diketahui nilai signifikan untuk pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan (X) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar $0,03 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,995 > t$ tabel (5) 3,18 maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan (X) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan substansial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan, sesuai dengan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian Merang Kahang. Menyatakan yang termasuk belanja pendidikan pemerintah, yang berpengaruh positif dan cukup besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Temuan analisis mendukung pernyataan (Wahid, 2012) bahwa pendidikan membutuhkan investasi dan pemerintah harus mampu membangun fasilitas dan sistem pendidikan yang baik. Investasi pemerintah di bidang pendidikan merupakan representasi praktis dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tiap individu masyarakat.

Investasi pembangunan di bidang pembangunan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Pengakuan pemerintah akan perlunya penguatan pendidikan ditunjukkan dengan alokasi pemerintah sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan. Pemerintah memandang pendidikan sebagai komponen penting dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan. Anggaran minimal disediakan oleh pemerintah, Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dinas wajib dialokasikan paling sedikit 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan dan paling sedikit 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah untuk bidang pendidikan, menurut dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (APBD). Anggaran untuk sektor pendidikan lainnya belum terealisasi karena dana yang dibutuhkan untuk peralatan dan perlengkapan pendidikan tidak sedikit.

Kesimpulan

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan substansial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan, sesuai dengan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pendidikan membutuhkan investasi dan pemerintah harus mampu membangun fasilitas dan sistem pendidikan yang baik. Investasi pemerintah di bidang pendidikan merupakan representasi praktis dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tiap individu masyarakat. Investasi pembangunan di bidang pembangunan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, C. M., & Mulyanti, D. (2019). Meningkatkan Taraf Perekonomian dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan. *Jurnal Abdimas BSI*, 2(1), 89–95. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Ika Sasti, Ferina and Abdurrohman, Abdurrahman and Ermadiani, E. and U. (2015). Pengaruh Belanja Pendidikan, Ekonomi, dan Pelayanan Umum Terhadap Partisipasi Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan. *Majalah Ilmiah Sriwijaya*, XX (12), XX(12), Ika Sasti, Ferina and Abdurrohman, Abdurrahman and. <https://repository.unsri.ac.id/14513/>
- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 193–208. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9472>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Pengangguran, P., Ekonomi, P., Kota, K., Provinsi, D. I., & Tengah, J. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Sanggolongan, S. M. M., Rumat, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Sulawesi Utara. <Http://Www.Sulutprov.Go.Id/Mengenal-Sulut/Sejarah/>, 15(02), 1–11.
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.1-22>
- Supriyanto, Y., Astuty, H. S., & Unwanullah, A. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017. *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban*, 01(01), 15–20.
- Utara, H., Diba, S., Pake, S., Kawung, G. M. V, Luntungan, A. Y., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 13–22.

- Wibowo, D. A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 10(2), 133–140. <https://doi.org/10.21831/economia.v10i2.7539>
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>
- Utomo, S. (2014). Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 258–266.
- Wijayanto, H., & Ode, S. (2019). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.82>
- Yuristia, A. (2017). Keterkaitan Pendidikan, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi Dan Pembangunan. *Ijtimaiah*, 1(1), 6.